

Pengaruh Belanja Modal Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2022

Anggi Juwita¹, Khairita Hasbi^{2*}

^{1,2*} Politeknik Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Corresponding Email: khairitahasbi@poltekkutaraja.ac.id ^{2*}

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang telah memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Periode 2019-2022. Jumlah pengeluaran setiap daerah berbeda – beda sesuai dengan besarnya daerah dan kebutuhan daerah. Data diolah dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera.

Kata kunci: Belanja Modal; Dana Perimbangan; Pendapatan Asli Daerah; Kinerja Keuangan Daerah.

Abstract. This research aims to determine the influence of capital expenditure, balancing funds and local original income on regional financial performance. The population in this research is 33 Regencies/Cities in North Sumatra Province which have data on the realization of the Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the 2019-2022 period. The amount of expenditure for each region varies according to the size of region and regional needs. The data is processed using panel data regression. The result of the research show that capital expenditure has a positive and significant effect on regional financial performance, balancing funds have a negative and significant effect on regional financial performance, and local original income has a positive and significant effect on regional financial performance in Sumatra Utara Province.

Keywords: Capital Expenditures; Balancing Funds; Regional Original Income; Regional Financial Performance.

Pendahuluan

Kapasitas keuangan daerah merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjadi indikator utama untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas otonominya. Otonomi daerah adalah upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan serta meningkatkan kemandirian daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 2, dijelaskan bahwa "Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Selain itu, Undang-Undang tersebut juga merinci tujuan otonomi daerah yang tercantum dalam tiga ayat, yaitu: "Menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah." Pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas kinerja daerah. Hal ini terkait erat dengan pengukuran kinerja keuangan daerah, baik dalam hal pengelolaan keuangan maupun aspek lainnya (Arfan *et al.*, 2023).

Pemerintah daerah memerlukan tenaga ahli dalam pengelolaan keuangan daerah agar pengelolaan sumber daya yang ada dapat berjalan dengan efektif. Pengelolaan keuangan daerah yang optimal adalah kunci keberhasilan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta merealisasikan berbagai program pembangunan sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam mengelola potensi kekayaan daerahnya (Nadia Febrianty *et al.*, 2023). Menurut Novita dan Arza (2024), penerapan rasio keuangan pada APBD merupakan salah satu metode untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara efektif. Penggunaan rasio ini untuk mengukur tingkat kemandirian ekonomi daerah juga mencerminkan praktik pengelolaan perekonomian yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Rasio

kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah *pendapatan asli daerah (PAD)* dengan total pendapatan daerah, yang mencakup bantuan dari pemerintah pusat atau pinjaman. Semakin tinggi nilai rasio, semakin baik kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat fenomena yang menarik terkait dengan beberapa variabel penting yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, seperti *belanja modal, dana perimbangan, dan PAD*. Realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan, dari 13,07 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 12,01 triliun rupiah pada tahun 2022. Penurunan ini juga berdampak pada penurunan kapasitas daerah dalam menghasilkan *PAD* sebesar 7,53 persen pada tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya daya beli masyarakat (Rizky *et al.*, 2023) dan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, belanja modal juga mengalami penurunan sebesar 22,2% dibandingkan dengan 2019. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti bencana alam dan penurunan daya beli masyarakat.

Pada tahun 2022, belanja modal menunjukkan peningkatan sebesar 55,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fenomena yang serupa juga terjadi di provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera, yang menunjukkan bahwa pengelolaan perekonomian daerah perlu dilakukan secara cermat dan terencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan pengaruh *belanja modal, dana perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemakmuran ekonomi di Provinsi Sumatera Utara serta menjadi referensi bagi studi lebih lanjut dalam bidang yang sama.

Tinjauan Literatur

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan hasil kegiatan dan program yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini, kegiatan kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada pertumbuhan pekerjaan di bidang keuangan daerah, termasuk anggaran dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah), dengan menggunakan indikator keuangan yang sudah ditetapkan berdasarkan politik atau hukum (Ramadana *et al.*, 2023). Kinerja keuangan dapat diukur dengan berbagai cara, namun ada beberapa indikator umum yang digunakan: pertumbuhan ekonomi, pendapatan pemerintah, belanja pemerintah, anggaran defisit/surplus, dan utang pemerintah. Perlu diingat bahwa kinerja keuangan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor politik dan sosial. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kegiatan perekonomian daerah harus dilakukan dengan komprehensif dan holistik.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 71 Tahun 2010, "Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya menambah belanja rutin, seperti biaya pemeliharaan kelompok belanja administrasi umum". Belanja modal digunakan untuk membeli aset tetap pemerintah daerah, seperti peralatan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Cara mendapatkan biaya modal, bila membeli dengan cara lelang atau tender. *Real estate* yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai hasil investasi merupakan prasyarat utama bagi penyediaan pelayanan publik. Dalam APBD, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk peningkatan aset tetap dalam bentuk anggaran investasi. Setiap tahun, pemerintah kota memperoleh aset tetap sesuai dengan prioritas anggaran dan layanan publik dengan implikasi keuangan jangka panjang (Hardi, 2019).

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang telah dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Adapun tujuan dari dana perimbangan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien (Padang & Padang, 2024).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya daerah yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering dijadikan sebagai peningkatan indikator kemajuan suatu daerah. PAD yang besar dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin maju (Mailindra, 2022). Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pengeluaran dalam bentuk belanja daerah. Salah satu belanja daerah yang penting yaitu belanja modal, yang memiliki sifat produktif dan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Penggunaan belanja modal yang efektif dapat menciptakan peluang lebih baik untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kinerja keuangan daerah. Karlinda *et al.*, (2021) berpendapat bahwa pengelolaan yang tepat akan meningkatkan pelayanan publik dan hasil kinerja keuangan yang baik. Dapat dikatakan bahwa belanja modal pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Dana perimbangan merupakan implementasi prinsip perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan, dana perimbangan memegang peran penting dalam mengelola keuangan daerah. Tidak semua daerah memiliki potensi yang sama untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dana perimbangan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi daerah.

Prastiwi & Aji (2020) berpendapat bahwa dana perimbangan memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan pemerintah daerah dengan mempengaruhi kinerja keuangan mereka, yang dapat menyebabkan menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berarti semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Pendapatan asli daerah bersifat khusus dan tidak memiliki nilai yang sama, karena bergantung pada kondisi karakteristik masing-masing daerah.

Pendapatan asli daerah merujuk pada penerimaan yang dikumpulkan dari daerah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk retribusi daerah, pajak daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya. Pemerintah daerah yang berhasil dalam mengelola keuangan dapat mencerminkan peningkatan kinerja keuangan, pembiayaan usaha, dan pembangunan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan biaya pemerintah pusat. Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap tata kelola keuangan yang diterapkan pemerintah daerah (Novita & Arza, 2024). Studi yang dilakukan Budianto & Alexander (2016) dan Lathifa & Haryanto (2019) mempengaruhi kondisi keuangan daerah secara positif melalui pendapatan daerah.

Metodologi Penelitian

Objek dan Sampel Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui pengukuran, menggunakan statistik dan angka. Populasi dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang terdiri dari wilayah tertentu yang memiliki sifat-sifat yang ditentukan oleh peneliti, dan dari situlah penelitian dan kesimpulan diambil (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab satu atau lebih masalah

dan untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.depkeu.go.id>), Departemen Keuangan, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2019 hingga 2022. Jumlah data yang digunakan adalah 33 kabupaten/kota dikali 4 tahun, sehingga menghasilkan total 132 data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Panel OLS* atau Model *Pooled OLS*, yaitu metode regresi yang menerapkan *Ordinary Least Squares* pada data panel. Model ini mengasumsikan bahwa semua entitas dalam kumpulan data memiliki karakteristik dasar yang sama, dengan periode penelitian dimulai dari tahun 2019 hingga 2022. Berikut adalah persamaan yang digunakan:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_i$$

Dimana:

- t : Tahun
- Y : Kinerja Keuangan Daerah
- α : Konstanta
- β_{1-2} : Koefisien Regresi
- X1 : Belanja Modal
- X2 : Dana perimbangan
- X3 : Pendapatan Asli Daerah
- e : Error

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran suatu data yang ditinjau dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan nilai standar deviasi. Dalam Penelitian ini, variabel yang digunakan dalam perhitungan statistik dekripsi adalah nilai Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah. Gambaran deskriptif disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel BM, DP, dan PAD

Variable	BM	DP	PAD
Min	24,52	26,70	23,22
Max	28,11	28,78	28,43
Mean	25,9087	27,5136	25,2095
Std.	,55884	,43012	,93989
Deviation			

Berdasarkan tabel 1 Sejak tahun 2019-2022, belanja modal paling banyak sebesar 24,52 dengan satuannya, nilai maksimum sebesar 28,11, Rata – rata nilai Belanja Modal adalah 25,9087 dengan standar deviasi ,55884. Dana Perimbangan paling banyak sebesar 26,70 dengan satuannya, nilai maksimum sebesar 28,78, Rata – rata nilai Dana Perimbangan adalah 27,5136 dengan standar deviasi ,43012. Pendapatan Asli Daerah paling banyak sebesar 23,22 dengan satuannya, nilai maksimum sebesar 28,43, Rata – rata nilai Pendapatan Asli Daerah adalah 25,2095 dengan standar deviasi ,93989.

Pengujian Kelayakan Model Regresi

Dalam penelitian ini, untuk menentukan apakah model estimasi *Fixed Effects Model* (FEM) dan *Random Effects Model* (REM) membentuk model regresi yang tepat, dilakukan beberapa pengujian, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Multikolinearitas. Berikut adalah penjelasan mengenai Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Multikolinearitas yang dilakukan dengan menggunakan *software EViews*.

Uji Chow

Uji Chow merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua model regresi terpisah dengan model regresi gabungan yang menggabungkan kedua submodel tersebut. Uji Chow digunakan untuk menguji apakah model gabungan (yang menggabungkan kedua submodel) lebih baik dibandingkan dengan model regresi yang terpisah.

Tabel 2. Hasil dari Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
Cross-section F	56.864664	(32.96)	0.0000	
Cross-section Chi-square	395.138586	32	0.0000	

Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/19/24 Time: 01:18				
Sample: 2019-2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 33				
Total panel (balanced) observations: 132				

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.417809	0.381656	-3.714883	0.0003
LNK1	0.042957	0.015791	2.720338	0.0074
LNK2	-0.107747	0.022496	-4.789609	0.0000
LNK3	0.134883	0.008460	15.94305	0.0000

R-squared	0.763215	Mean dependent var	0.130992
Adjusted R-squared	0.757665	S.D. dependent var	0.128614
S.E. of regression	0.063314	Akaike info criterion	-2.651602
Sum squared resid	0.513101	Schwarz criterion	-2.564244
Log likelihood	179.057	Hannan-Quinn criter.	-2.616104
F-statistic	137.5247	Durbin-Watson stat	0.235537
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dalam Pengujian nya uji chow merupakan pengujian yang menggambarkan model terbaik antara *common effect* dan *model fixed effect*. Berdasarkan hasil uji Chow pada penelitian ini terlihat nilai probabilitas untuk *cross section chi-square* sebesar $0,0000 < 0,005$ sehingga hasil menunjukkan bahwa H^0 ditolak, artinya *fixed effect* model lebih tepat digunakan daripada *common effect model* untuk mengestimasi data panel. Proses Selanjutnya untuk Uji Hausman.

Uji Hausman

Uji Hausman adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan model efek tetap dan efek acak dalam analisis data panel. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua model. Jika uji Hausman menunjukkan perbedaan yang signifikan maka model *fixed effect* dinilai lebih tepat karena asumsinya lebih kuat.

Tabel 3. Hasil dari Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: Untitled				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	49.710891	3	0.0000	

Cross-section random effects test comparisons:				
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LNK1	0.011071	0.009798	0.000001	0.1679
LNK2	-0.113209	-0.091223	0.000017	0.0000
LNK3	0.054560	0.084515	0.000020	0.0000

Cross-section random effects test equation:				
Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/19/24 Time: 01:24				
Sample: 2019-2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 33				
Total panel (balanced) observations: 132				

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.583524	0.367796	4.305446	0.0000
LNK1	0.011071	0.009735	1.930549	0.0585
LNK2	-0.113209	0.011246	-10.06656	0.0000
LNK3	0.054560	0.008120	6.718845	0.0000

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.988134	Mean dependent var	0.130992	
Adjusted R-squared	0.987982	S.D. dependent var	0.128614	
S.E. of regression	0.016366	Akaike info criterion	-5.60227	
Sum squared resid	0.025713	Schwarz criterion	-4.374009	
Log likelihood	376.5750	Hannan-Quinn criter.	-4.840744	
F-statistic	220.4000	Durbin-Watson stat	1.841792	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu uji husman menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Chi-square* sebesar 0,000 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan sebesar 0,0000 ($0,0000 < 0,05$) sehingga hasil penelitian ini H^0 ditolak dan H^1 diterima sehingga dapat disimpulkan model yang dipilih adalah *fixed effect model*.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan analisis yang dilakukan dalam regresi data panel dengan mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang kuat antara dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari multikolinearitas adalah untuk menganalisis apakah memiliki masalah multikolinearitas yang dapat mempengaruhi keandalan hasil regresi (Sholihin & Anggraini, 2021). Hasil uji Multikolinearitas yang baik ketika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yaitu kurang dari 10 dan sedangkan nilai toleransi dengan nilai lebih dari 0,10.

Tabel 3. Hasil dari Uji Multikolinearitas

	LNX1	LNX2	LNX3
LNX1	1.000000	0.769524	0.629385
LNX2	0.769524	1.000000	0.705482
LNX3	0.629385	0.705482	1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terlihat dari gambar di atas tidak terjadi multikolinearitas dengan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10.

Pengujian Hipotesis

Pada pengujian hipotesis, akan dilakukan analisis koefisien determinasi, pengujian pengaruh simultan (uji F), dan pengujian pengaruh parsial (uji T). Nilai koefisien dari determinasi, uji F, dan uji T tersaji pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai Koefisien Determinasi Uji f, Uji t

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/19/24 Time: 01:13				
Sample: 2019 2022				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 33				
Total panel (balanced) observations: 132				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.583524	0.367796	4.305446	0.0000
LNX1	0.011071	0.006735	1.930549	0.0565
LNX2	-0.113209	0.011246	-10.06656	0.0000
LNX3	0.054560	0.008120	6.718845	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.988134	Mean dependent var	0.130992	
Adjusted R-squared	0.983808	S.D. dependent var	0.128614	
S.E. of regression	0.016366	Akaike info criterion	-5.160227	
Sum squared resid	0.025713	Schwarz criterion	-4.374009	
Log likelihood	376.5750	Hannan-Quinn criter.	-4.840744	
F-statistic	228.4091	Durbin-Watson stat	1.841792	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 4 nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar $R^2 = 0,9881$. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa belanja modal dan dana perimbangan secara simultan mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 98,81% sisanya sebesar 1,19% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Uji Signifikan Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji adanya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel tak bebas. Berdasarkan tabel 4.3, diketahui nilai Prob. (*F-Statistics*), yakni $0,0000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas Belanja Modal dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Persamaan Regresi Data Panel dan Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,01 - 0,11 + 0,05Y = 0,01 - 0,11 + 0,05Y = 0,01 - 0,11 + 0,05$$

Berdasarkan Tabel diketahui hal-hal berikut:

- 1) Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,01 dan signifikan dengan nilai Prob. 0,0565 $< 0,05$. Dengan demikian, Belanja Modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam hal ini, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Peningkatan Belanja Modal akan seiring dengan peningkatan kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya, penurunan dalam penerimaan Belanja Modal akan menyebabkan penurunan dalam kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, Belanja Modal perlu terus digali sebagai sumber pendanaan yang optimal, misalnya yang bersumber dari *PAD*, *DAU*, dan *DAK*, sehingga belanja modal dapat digunakan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur dan fasilitas publik.
- 2) Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, dengan nilai koefisien -0,11 dan signifikan dengan nilai Prob. $0,0000 < 0,05$. Oleh karena itu,

Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam hal ini, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Peningkatan Dana Perimbangan akan berbanding terbalik dengan kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya, penurunan penerimaan Dana Perimbangan akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan daerah.

- 3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, dengan nilai koefisien 0,05 dan signifikan dengan nilai Prob. $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dalam hal ini, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Peningkatan PAD akan sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya, penurunan penerimaan PAD akan menyebabkan penurunan dalam kinerja keuangan daerah.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis deskriptif menunjukkan adanya variasi pada variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah, yaitu Belanja Modal (BM), Dana Perimbangan (DP), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata belanja modal adalah 25,91 dengan standar deviasi yang relatif kecil, menandakan adanya stabilitas dalam pengelolaan belanja modal oleh pemerintah daerah. Untuk Dana Perimbangan, rata-rata nilai sebesar 27,51 dengan standar deviasi yang lebih rendah menunjukkan bahwa dana perimbangan cenderung konsisten. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan variasi yang lebih besar, dengan rata-rata 25,21 dan standar deviasi yang lebih tinggi, yang mencerminkan adanya ketidakpastian dalam penerimaan PAD dari tahun ke tahun. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa PAD berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah (Prastiwi & Aji, 2020; Arfan *et al.*, 2023). Pengujian kelayakan model regresi menunjukkan bahwa model *Fixed Effects* (FE) lebih tepat digunakan dibandingkan model

Common Effects (CE), berdasarkan hasil Uji Chow yang menunjukkan probabilitas yang sangat kecil ($0,0000 < 0,05$). Selanjutnya, Uji Hausman juga mendukung penggunaan model *Fixed Effects* karena adanya perbedaan signifikan antara model tersebut dan model *Random Effects* (*p*-value = 0,0000). Temuan ini serupa dengan penelitian Mahendra & Barus (2023) yang juga menemukan bahwa model *Fixed Effects* lebih tepat untuk menganalisis pengaruh variabel terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu, Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas di antara variabel independen, yang berarti hasil regresi dapat diandalkan (Sholihin & Anggraini, 2021). Hasil Uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa 98,81% variabilitas kinerja keuangan daerah dapat dijelaskan oleh Belanja Modal dan Dana Perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja keuangan daerah, yang sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi pentingnya Belanja Modal dan Dana Perimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah (Lathifa & Haryanto, 2019; Budianto & Alexander, 2016). Uji F menunjukkan bahwa secara simultan, Belanja Modal dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (*p*-value = $0,0000 < 0,05$).

Pada pengujian pengaruh parsial, hasil regresi menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dengan nilai koefisien 0,01 dan nilai probabilitas 0,0565. Ini berarti bahwa peningkatan Belanja Modal berpotensi meningkatkan kinerja keuangan daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur publik. Temuan ini mendukung penelitian yang mengungkapkan bahwa Belanja Modal yang efektif dapat memperbaiki kinerja keuangan daerah (Hardi, 2019; Lathifa & Haryanto, 2019). Di sisi lain, Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, dengan nilai koefisien -0,11 dan nilai probabilitas 0,0000. Peningkatan Dana Perimbangan justru menurunkan kinerja keuangan daerah, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada dana pusat dapat mengurangi kemandirian daerah

dalam mengelola keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, dengan nilai koefisien 0,05 dan nilai probabilitas 0,0000, yang mengindikasikan bahwa peningkatan PAD dapat memperbaiki kinerja keuangan daerah, sejalan dengan temuan dalam literatur (Novita & Arza, 2024; Budianto & Alexander, 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara, perhatian perlu diberikan pada pengelolaan Belanja Modal yang efisien dan peningkatan PAD. Sementara itu, pengelolaan Dana Perimbangan yang lebih hati-hati juga perlu diperhatikan agar tidak mengurangi kemandirian keuangan daerah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal berpotensi memperbaiki kinerja keuangan daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur publik. Sementara itu, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, mengindikasikan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat dapat mengurangi kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, yang berarti peningkatan PAD dapat memperbaiki kondisi keuangan daerah. Untuk memperkuat temuan ini, disarankan agar dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain, seperti pendapatan daerah dan belanja daerah lainnya, serta indikator rasio kinerja keuangan daerah, termasuk Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, dan Rasio Keserasian. Selain itu, penelitian mendatang sebaiknya memperluas jumlah sampel atau menambah variabel seperti kekayaan daerah, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Arfan, R., Ambartiasari, G., Akbar, I., & Nanda, N. (2023). Analisis Rasio Pendapatan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Banda Aceh Tahun 2017-2020. *Jurnal Economina*, 2(4), 979-992. DOI: <https://doi.org/10.55681/economina.v2i4.481>.
- Asnidar, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 9-18.
- Budianto, B., & Alexander, S. W. (2016). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4). DOI: <https://doi.org/10.35794/emb.4.4.2016.14511>.
- Karlinda, A. E., Azizi, P., & Sopali, M. F. (2021). THE EFFECT OF WORK EXPERIENCE, WORK ACHIEVEMENT, EDUCATION AND TRAINING ON CAREER DEVELOPMENT IN PT. PLN (PERSERO) KOTA PADANG RAYON KURANJI. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 5(2), 523-530.
- Lathifa, H., & Haryanto, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Mahendra, A., & Barus, N. B. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 8842-8852. DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7634>.

- Natawiria, A. S., & Riduwan, H. I. (2010). *Statistika Bisnis*. Bandung: *Alfabeta*.
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(1), 430-443. DOI: <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1367>.
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2024). PENGARUH DANA PERIMBANGAN BELANJA MODAL DAN FISCAL STRESS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 73-86. DOI: <https://doi.org/10.54367/jrak.v10i1.3524>.
- Pagarra, F., Ibrahim, M. A., Sukri, S., & Hasniati, H. (2024). Implementation of Innovation in Improved Governance Original Local Income in Makassar City. *Journal of Management and Administration Provision*, 4(2), 214-222. DOI: <https://doi.org/10.55885/jmap.v4i2.384>.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wirabawa*, 28(1), 89-105. DOI: <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>.
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmani, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831-1840. DOI: 10.33395/owner.v7i2.1590.
- Rizky, F., Azhari, A., & Arfan, R. (2023). Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Selama Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Pulau Sumatera. *Jurnal Investasi Islam*, 8(2), 165-181.
- Sholihin, M., & Puspita Ghaniy Anggraini, S. E. (2021). *Analisis data penelitian menggunakan software STATA*. Penerbit Andi.